

PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Riska Septa Yuliandri, Siti Tiara Maulia

Program Studi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi

Email: riskaseptayuliandri@gmail.com sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi, tetapi juga sebagai tempat mencari informasi, berdiskusi dan membentuk jaringan. Apalagi setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing dan mengolah informasi yang ada di media sosial yang akan dijadikan sebagai pengetahuan politik. Peran media massa dalam mempromosikan partisipasi politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan seperti stereotip gender, kurangnya keterwakilan, sensasionalisme, hambatan akses, dan kurangnya pengakuan terhadap keontngan dalam politik. Media harus memprioritaskan isu-isu substansi dari pada konflik pribadi atau penampilan fisik. Memperkuat perlindungan hukum terhadap pelecehan online dan meningkatkan akses terhadap teknologi juga merupakan langkah yang diperlukan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, media massa dapat memainkan peran penting dalam meberdayakan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh peneliti, dilakukan melalui literatur review. Literatur review adalah sebuah tipe jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan awal dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa paragraf ringkas (intisari) yang ditulis oleh penulis dalam teks (Snyder, 2019:333). Data penulis didapatkan melalui penelitian terdahulu, artikel, jurnal serta mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Media Massa Demokrasi, Media Sosial, Pengetahuan Politik

Abstract

Social media is not only used as a place to communicate, but also as a place to find information, discuss and form networks. Moreover, each society has its own way of processing information on social media which will be used as political knowledge. The role of mass media in promoting political participation is very important to strengthen democracy in Indonesia. However, there are several challenges such as gender stereotypes, lack of representation, sensationalism, barriers to access, and lack of recognition of the interests in politics. The media must prioritize issues of substance over personal conflicts or physical appearance. Strengthening legal protections against online harassment and increasing access to technology are also necessary steps. By overcoming these challenges, mass media can play an important role in empowering and strengthening democracy in Indonesia. This research uses descriptive quantitative research methods. Data collection techniques in descriptive qualitative research developed by researchers are carried out through literature reviews. Literature review is a type of research methodology used to collect and analyze initial findings from previous research as well as analyze several summary paragraphs (digests) written by the author in the text (Snyder, 2019: 333). The author obtained data through previous research, articles, journals and looking for other relevant sources on the internet to strengthen the results of the research conducted.

Keywords: political participation, democratic mass media, social media, political knowledge

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi digital, Indonesia tidak dapat mengendalikan dampak signifikan yang ada terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Media sosial telah menjadi sebuah trend dalam komunikasi sosial di era modern ini. Salah satu platform yang tengah populer adalah media online, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi konten, dan menciptakan berbagai jenis isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual (kompas.com, 2016). Secara umum, pengguna media sosial merupakan anggota dari generasi milenial atau yang sering disebut generasi Y, yang lahir antara tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Istilah "generasi Y" pertama kali digunakan dalam editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993 (Adyani dan Putra, 2016). Generasi ini cenderung aktif menggunakan berbagai teknologi komunikasi instan seperti email, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Ainiyah (2018) mencatat bahwa masa milenial ditandai oleh tingkat kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal baru, memungkinkan mereka untuk dengan mudah beradaptasi dengan perubahan, terutama di media sosial yang menawarkan beragam fitur menarik. Karena itu, generasi milenial cenderung tertarik pada fitur-fitur baru tanpa mempertimbangkan konten yang terkandung di dalamnya, baik itu positif atau negatif. Partisipasi politik merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Negara di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan hak-hak seperti menyampaikan pendapat, berhak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan, serta hak mendapatkan keadilan. Melalui partisipasi politik, warga negara memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan politik (Muhaling, 2015).

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Generasi milenial memiliki potensi besar dalam hal ini, termasuk dalam urusan politik. Di era globalisasi seperti pada saat ini dan juga seiring bertambahnya zaman, maka kita akan di hadapkan dengan Kemajuan, yang di mana di kemudian hari Ilmu Pengetahuan dan juga teknologi akan semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Media sosial adalah sebuah media online, di mana penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet. Dengan hadirnya media tersebut, menunjukkan adanya pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula bersifat klasik (media elektronik dan cetak) mengalami perubahan ke media baru (new media) berbasis internet. Media sosial menjadi saluran akses informasi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik.

Misalnya di gunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum di masyarakat, dan juga ada beberapa akun media sosial yang memberikan informasi mengenai info-info seputar politik. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan "Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam bertingkah laku atau bertindak dalam pergaulan hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika orang itu megakibatkan kerugian pada orang lain. atau membala-raLan diri atau harta orang lain, atau menyebabkan orang kehilangan kemerdekaannya. Ganti kerugian itu berbentuk denda dan sebagainya" (Kansil. 1980 | 36). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lebih tepatnya dalam bentuk media sosial, telah merubah lanskap sosial politik di era digital ini secara mendasar. Media sosial telah menjadi platform utama bagi individu dan kelompok untuk berbicara tentang berbagai masalah sosial politik, berbagi informasi, dan berorganisasi.

Perkembangan penggunaan media massa oleh masalah kebutuhan masyarakat itu sendiri Akankah informasi masyarakat meningkatkan jenis dan jumlah media massa yang berkembang yang masuk ke area umum. Media memiliki peran penting dalam melindungi bias ekonomi

bangsa. bertahan, berkembang, dan menguasai lini ruang publik. Sejarah masyarakat telah mengekalkan beberapa lembaga media yang memiliki kontrol atas sebagian besar area publik. Di era digital ini, partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial dan politik dan pengaruh media sosial memiliki konsekuensi secara internasional dan lokal. Hadirnya platform media sosial seperti Instagram, X, Tiktok, Facebook, dan lainnya menjadi sangat menarik karena Sosial media dianggap sebagai kekuatan. Sosial media dianggap sebagai pilar kelima demokrasi. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan pilar demokrasi dari trias politik.

Peran media massa sebagai pengendali proses pemerintahan dan demokrasi semakin diakui, dan sekarang dianggap sebagai pilar keempat dari sistem demokrasi. Media massa juga dianggap sebagai lembaga yang harus melepaskan diri dari sumber kekuasaan (Gelgel, 2019). Pemilu tahun 2024 mungkin menarik karena Generasi Milenial dan Generasi Z akan menjadi mayoritas pemilih. Mereka tergolong besar dalam struktur demografi Indonesia. Misalnya, Gen Z, yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012, menyumbang 27,7 persen dari populasi. Kaum millennial, yang lahir dari tahun 1981 hingga 1996, menyumbang 25,8 persen dari populasi Indonesia (BPS 2020). Sebelum bonus demografi 2045, struktur demografi Indonesia akan berubah secara signifikan selama dua puluh tahun ini. Kaum milenial dan Gen Z datang bersamaan dengan era disrupsi teknologi informasi, yang didefinisikan sebagai perubahan penting yang disebabkan oleh perkembangan sistem teknologi.

Orang-orang yang lahir pada masa berkembangnya teknologi digital, yang ditandai dengan meluburnya informasi dan Penggunaan ruang virtual secara ekstensif. Di era digitalisasi saat ini Indonesia mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat. Pada dasarnya pemerintah dan lembaga politik perlu mempertegas peran komunikasi politik dalam membentuk persepsi, keterlibatan dan meningkatkan partisipasi generasi milenial dalam rana politik, komunikasi politik yang efektif dapat memotivasi generasi milenial untuk terlibat secara aktif dan merangsang dialog yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan masyarakat dan Negara (Nibrosu Rohid, 2024). Secara khusus komunikasi politik memiliki keterkaitan dengan tingkat partisipasi generasi milenial dalam proses pemilu 2024 mendatang (Rosidi, 2017). Generasi milenial merupakan kelompok demografis yang memiliki prioritas, karakteristik unik dan memiliki strategi komunikasi yang berbeda dalam memotivasi diri mereka.

Salah satu bagian utama di dalam hubungan komunikasi politik dengan partisipasi politik generasi milenial adalah peran media sosial. Generasi milenial merupakan generasi yang cenderung memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan lainnya untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu yang mereka anggap penting. Hal ini membuat generasi milenial terbantu dalam proses keterlibatan mereka dalam berpartisipasi aktif di dunia politik. Seperti yang di ungkap oleh Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, sejumlah 204.807.222 pemilih yang tercatat di DPT nasional. Pada saat pemilu serentak 2024 di perkiraan jumlah pemilih pemula mengalami peningkatan yang sangat drastis. Jika dilihat dari pemilu serentak 2019 yang lalu, menurut data yang dikeluarkan oleh KPU pemilih pemula mencapai 70 juta – 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Maka dari itu 35% - 40% pemilih pemula memiliki pengaruh begitu besar terhadap hasil pemilu dan mempengaruhi kemajuan bangsa.

Akan tetapi permasalahan yang kemungkinan terjadi dengan keikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi yaitu berpeluang menjadi penyumbang golput dalam pemilu 2024 (bawaslu.go.id, 2023). Di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat 54.653 pemilih pemula di tahun 2024 (detiksulsel.com, 2023). Komunikasi memiliki pengaruh penting dalam sistem politik di Indonesia untuk menjalin interaksi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya generasi milenial. Peran komunikasi politik sangat berpengaruh di setiap tahap proses politik akan tetapi selalu diabaikan oleh aktor politik. Organisasi pemerintah yang memanfaatkan

peran komunikasi politik untuk memperkenalkan identitas serta kebijakan – kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat terkhusus generasi milenial sebagai pelaksana kebijakan(Kawwami & Islamia, 2023).

Menurut Bambang Setiawan yang dikutip oleh (Eko Harry Susanto, 2013) berpendapat,“Komunikasi proses dimana lembaga politik atau kekuatan politik dalam menyampaikan pendapat, sikap serta tingkah laku mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.”. Nimmo 2005 yang dikutip oleh (Kamal, Darmawan, & Agustino, 2021) berpendapat bahwa “aktor politik merupakan seseorang yang memiliki kemampuan berbicara seputar politik atau seseorang yang ada di lingkungan politik seperti politikus dan aktivis politik. Menurut Sutardji yang dikutip oleh (Daulay, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga indikator komunikasi antara lain: Pemahaman, Kesenangan dan Tindakan.sedangkan, Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016) yang dikutip oleh (Alvin, 2020) Pemerintahan memiliki PR pada pengelolaan informasi dan komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan dukungan terhadap program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.

Menurut Theocharis dan Jungherr (2021) yang dikutip oleh (Triwicaksono & Nugroho, 2021) Mendeskripsikan bahwa komunikasi politik memiliki rumusan berbentuk komunikasi yang di arahkan agar mencapai suatu pengaruh sehingga apa yang dibicarakan mengenai kegiatan di lingkup komunikasi semua warga melalui suatu sanksi yang telah ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Generasi milenial merupakan generasi yang memiliki ciri khas dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Generasi milenial salah satu generasi yang memiliki peluang besar ikut secara aktif dalam dunia politik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang dapat di akses dengan mudah(Nia Sofiyatul Millah, 2021). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek yang berbeda dari partisipasi politik generasi muda.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2005) sebagaimana dikutip (dalam Salmaa, 2023) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif berfokus kepada fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sosial maupun perilaku manusia yang kemudian dianalisis dan dijabarkan dengan cara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh peneliti, dilakukan melalui literatur review. Literatur review adalah sebuah tipe jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan awal dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa paragraf ringkasasan (intisari) yang ditulis oleh penulis dalam teks (Snyder, 2019:333). Data penulis dapatkan melalui penelitian terdahulu, artikel, jurnal serta mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Massa

Peran media massa dalam memoderasi dialog politik memiliki implikasi penting dalam konteks demokrasi modern. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis konten media, penelitian ini mengkaji peran media massa dalam memfasilitasi dialog politik,mengamati dampaknya terhadap partisipasi masyarakat, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh media massa. Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa media massa memiliki peran utama dalam memfasilitasi dialog politik. Media massa menyediakan platform dan saluran komunikasi yang luas untuk pertukaran

gagasan, pandangan, dan informasi politik. Melalui pemberitaan yang seimbang, analisis mendalam, dan penyajian perspektif yang beragam, media massa dapat membantu memoderasi dialog politik dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembentukan opini publik yang informasional.

Dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa media massa memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan persepsi politik. Konten media massa dapat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik. Pemberitaan yang seimbang, akurat, dan obyektif menjadi kunci penting dalam menjaga integritas media massa dalam memoderasi dialog politik. Selain itu, penyajian perspektif yang beragam juga penting untuk memperkaya diskusi politik dan mendorong pemahaman yang lebih holistik. Namun, peran media massa dalam memoderasi dialog politik juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah adanya bias politik atau kepentingan komersial yang dapat memengaruhi independensi dan obyektivitas media massa. Pemilihan berita yang tidak seimbang, penonjolan sudut pandang tertentu, atau pengabaian terhadap perspektif yang berbeda dapat mengurangi efektivitas media massa sebagai mediator dalam dialog politik.

Selain itu, polarisasi politik yang semakin meningkat juga menjadi tantangan bagi media massa dalam memoderasi dialog politik. Dalam situasi polarisasi yang kuat, media massa bisa terjebak dalam memperkuat kesenjangan dan konflik yang ada, daripada berperan dalam membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang konstruktif. Oleh karena itu, media massa perlu mampu menghadapi tantangan ini dengan mempromosikan dialog yang inklusif, memfasilitasi perdebatan yang beragam, dan menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda. Di samping tantangan yang dihadapi, media massa juga memiliki peluang untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas peliputan politik. Meningkatkan transparansi, keberagaman perspektif, dan partisipasi masyarakat dalam ruang dialog politik adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh media massa.

Penggunaan teknologi digital dan platform interaktif juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dialog politik dan melibatkan lebih banyak partisipan. Dalam kesimpulannya, peran media massa dalam memoderasi dialog politik sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat. Melalui pemberitaan yang seimbang, analisis mendalam, dan penyajian perspektif yang beragam, media massa dapat membantu menciptakan lingkungan dialog politik yang konstruktif. Namun, tantangan seperti bias politik, polarisasi politik, dan penyebaran berita palsu juga perlu diatasi agar media massa dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Peluang untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas peliputan politik juga harus dimanfaatkan oleh media massa guna memajukan dialog politik yang inklusif dan informasional.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh media massa dalam menjalankan peran sebagai moderator dialog politik:

1. adanya bias politik atau kepentingan komersial yang dapat memengaruhi keobjektifan media.
2. polarisasi politik yang semakin meningkat di masyarakat dapat mempengaruhi peran media massa dalam memoderasi dialog politik.
3. penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik pada media massa.

Selain itu, media sosial juga memainkan peran besar dalam memberikan akses informasi politik. Melalui platform-media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, perempuan dapat mengikuti akun-akun yang memberikan informasi politik, mengikuti kampanye politik, dan terlibat dalam diskusi politik. Media sosial juga memungkinkan perempuan untuk membagikan pengalaman dan pandangan mereka, serta melibatkan diri dalam gerakan politik online, seperti hashtag dan kampanye daring. Dengan demikian, media sosial memberikan

akses yang lebih luas dan mudah untuk memperoleh informasi politik dan berkontribusi dalam ruang politik. Peran media massa dalam memberikan akses informasi politik kepada perempuan adalah kampanye. Kampanye ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan dengan meningkatkan pemilih perempuan dan memberikan informasi politik yang relevan kepada mereka. Selain itu, program talk show seperti "Women in Politics" dan "Political Power Women" memberikan wawasan tentang posisi dan peran perempuan dalam politik.

Partisipasi Politik Masyarakat

Melalui penelitian literatur yang cermat, beberapa temuan signifikan terkait pengaruh partisipasi politik terhadap hasil pemilihan umum. Salah satunya adalah bahwa tingkat partisipasi politik, termasuk dalam pemilihan umum, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya, tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik, dengan individu berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif secara politik. Penelitian Firda (2023) juga menyoroti peran status sosio-ekonomi dalam menentukan tingkat partisipasi politik, dengan individu dari lapisan masyarakat yang lebih tinggi sering kali lebih terlibat dalam proses politik daripada mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah. Di sisi lain, status sosio-ekonomi yang lebih tinggi juga berperan penting dalam membentuk partisipasi politik. Individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi seringkali memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya yang relevan, seperti informasi politik yang berkualitas dan waktu luang yang cukup, yang keduanya merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan dalam aktivitas politik.

Misalnya, mereka mungkin memiliki akses lebih baik ke media yang memberikan liputan yang mendalam tentang isu-isu politik, atau mereka dapat memanfaatkan jaringan sosial dan acara-acara politik yang memerlukan biaya atau waktu yang signifikan untuk dihadiri. Dengan demikian, pendidikan dan status sosio-ekonomi merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan berdampak positif terhadap partisipasi politik. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa ada kesenjangan dalam partisipasi politik yang dapat terjadi karena perbedaan dalam tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan partisipasi politik yang lebih merata dan inklusif, penting bagi pemerintah kepentingan terkait untuk mengadopsi kebijakan yang memperkuat akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi politik dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam masyarakat.

Ketiga, dalam konteks modern, peran teknologi informasi dan media sosial semakin memegang peranan signifikan dalam membentuk perilaku politik dan partisipasi pemilih. Media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk berinteraksi, berbagi informasi politik, dan mengorganisir gerakan politik dengan cepat dan efektif. Dengan kehadiran media sosial, individu memiliki akses langsung ke berbagai sumber informasi politik, yang memungkinkan mereka untuk secara aktif terlibat dalam diskusi dan debat politik, serta membuat keputusan yang terinformasi. Selain itu, media sosial juga memungkinkan pembentukan komunitas politik secara online, di mana individu dengan minat dan pandangan politik yang sama dapat terhubung, berkolaborasi, dan menggerakkan perubahan bersama-sama.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat tentang berbagai isu politik, pemikiran, dan posisi yang berbeda. Media massa memoderasi dialog politik melalui pemberitaan yang seimbang, analisis mendalam, dan penyajian beragam perspektif. Media massa menyediakan platform interaktif, seperti surat pembaca, forum online, dan acara diskusi, yang memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat. pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan faktor-

faktor yang memengaruhinya. Dari studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, status sosio-ekonomi, dan akses terhadap informasi politik. Selain itu, peran teknologi informasi dan media sosial juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku politik dan partisipasi pemilih.

Oleh karena itu, untuk memperkuat proses demokratisasi, penting bagi pemangku kepentingan politik untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi politik yang luas dan inklusif. Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan politik, memperkuat akses terhadap informasi politik yang objektif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana untuk mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dema, H., & R, M. R. R. (2024). Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Millennial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 690–703.
- Farid, A. S. (2023). Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 151–161.
<https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/343>
- Indonesia, U. K. (2024). *Pengaruh Partisipasi Politik dalam Pemilu 2024*. 3(5), 76–81.
- Indrajit, D. (2015). *Peran Media Sosial dalam Membangun Opini Masyarakat*. 4(2), 39–47.
- Lumentut, R. J., Lopian, M. T., & Lambey, T. (2023). Peran Media Sosial Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Desa Atep *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–6.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/50478%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/50478/43716>
- Maharani, B., & Hidayah, N. (2021). Peran Media Sosial dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 275–286.
<https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9926>
- Nur Fadilla, A., Safitri Agustina, R., & Aulia Syafikarani, F. (2024). Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 17–23.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Political Participation of the Sleman Community in the Covid-19 Pandemic Period in the Context of Citizenship Education. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/14994>
- Nurhayati, M. (2023). Komunikasi Politik dan Peran Media dalam Pemilihan Umum Penulis Korespondensi. *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 1(2), 217–222.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Randyca, P., Xaverius, F., Pernando, P., & ... (2024). Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Massa dan Partisipasi Politik Masyarakat. *ULIL ALBAB: Jurnal ...*, 3(5), 96–105. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/3356>

- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72–78. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116–123. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>